



**PENGARUH INFLASI, PDRB, DAN UPAH MINIMUM
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

DEWI SEPTIANI BAKO

NPM. 1615210053

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

N A M A : DEWI SEPTIANI BAKO
NPM : 1615210053
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Inflasi, PDRB, Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Deli Serdang

KETUA PROGRAM STUDI

BAKHTIAR EFENDI, S.E., M.Si

PEMBIMBING I

SAIMARA A.M SEBAYANG, SE., M. Si

MEDAN, JUNI 2021



Dr. ONNY MEDALINE, SH., M.Kn

PEMBIMBING II

RAHMAD SEMBIRING, S.E., M.SP



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN
SARJANA LENGKAP FAKULTAS SÓSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

N A M A : DEWI SEPTIANI BAKO
NPM : 1615210053
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Inflasi, PDRB, Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Deli Serdang

MEDAN, JUNI 2021

KETUA


LIA NAZLIANA NASUTION, SE., M.Si

ANGGOTA II


RAHMAD SEMBIRING, S.E., M.SP


ANGGOTA I


SAIMARA A.M SEBAYANG, SE., M.Si

ANGGOTA III


BAKHTIAR EFENDI, S.E., M.Si

ANGGOTA IV


DEWI MAHRANI RANGKUTY, SE., M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEWI SEPTIANI BAKO
NPM : 1615210053
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains / Ekonomi pembangunan
Judul Skripsi : Pengaruh Inflasi, PDRB, Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Deli Serdang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan; mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Serdang, Juni 2021

Dewi Septiani Bako

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEWI SEPTIANI BAKO
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 21 Sept 1989
NPM : 1615210053
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Alamat : Jl Karya Gg Sukadame Kel. Sei Agul Medan Barat

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubung dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi melakukan ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juni 2021
Yang membuat pernyataan



Dewi Septiani Bako



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : DEWI SEPTIANI BAKO
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 21 September 1989
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615210053
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Konsentrasi : Ekonomi Publik & SDA
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3.67
 Nomor Hp : 085335405162
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul
Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Deli Serdang

Isi : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 22 Januari 2020
Pemohon

(Dewi Septiani Bako)

Tanggal : Disahkan oleh : Dekan (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)	Tanggal : Disetujui oleh: Ka. Prodi Ekonomi Pembangunan (Bakhtiar Efendi, SE., M.Si.)
---	--

Tanggal : Disetujui oleh : Dosen Pembimbing I : (Saimara A.M. Sebayang, SE., M.Si)	Tanggal : Disetujui oleh: Dosen Pembimbing II: (Rahmad Sembiring, SE., M.SP)
---	---

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

: DEWI SEPTIANI BAKO
 : 1615210053
 : Ekonomi Pembangunan
 : Strata Satu
 : Saimara A.M Sebayang, SE., M.Si
 : Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Deli Serdang

2020	perbaiki sesuai yang telah dibimbing di berita acara manual	Revisi	
2020	acc seminar proposal	Disetujui	
2020	format abstrack bahasa Indonesia sesuaikan dengan panduan halaman skripsi minimal 63 halaman Perlu diperjelas dari mana data diolah pembahasasn hasil penelitian di BAB IV harus sesuai dengan metode penelitian di BAB III	Revisi	
2021	sesuaikan bab 3 dengan bab 4	Revisi	
2021	file tidak bisa dibuka	Revisi	
2021	acc meja hijau	Disetujui	

Medan, 26 Februari 2021
Dosen Pembimbing,



Saimara A.M Sebayang, SE., M.Si

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3802/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : DEWI SEPTIANI BAKO
NIM : 1615210053
Kelas/Semester : Akhir
Mata Kuliah : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ekonomi Pembangunan

Sejak tanggal 02 Maret 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
juga terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 02 Maret 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 2/26/2021 12:07:45 PM

Analyzed document: DEWI SEPTIANI BAKO_1615210053_EKONOMI PEMBANGUNAN.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License04

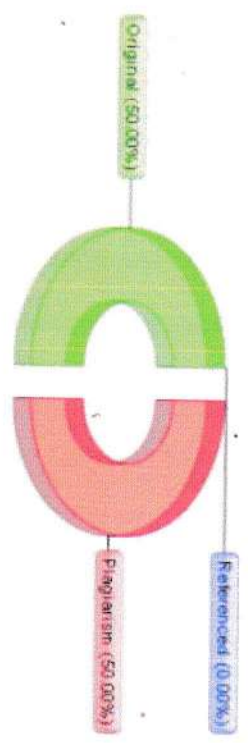
2 Comparison Phase: Rewrite 2 Detected language:

2 Check type: Internet Check



Detailed document body analysis

2 Relation chart



2 Distribution graph

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 02 Maret 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI SEPTIANI BAKO
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 21 September 1989
 Nama Orang Tua : Abnir Bako
 N. P. M : 1615210053
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 No. HP : 085335405162
 Alamat : JL Karya Gg Sukadame Medan Barat

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Deli Serdang**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Ukuran Toga : **S**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



DEWI SEPTIANI BAKO
 1615210053

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan



*ace jiter
plus
PDX*

**PENGARUH INFLASI, PDRB, DAN UPAH MINIMUM
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

DEWI SEPTIANI BAKO
NPM. 1615210053

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI.
M E D A N
2021**



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
 MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DEWI SEPTIANI BAKO
NPM : 1615210053
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Rahmad Sembiring, SE.,M.SP
Judul Skripsi : Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Deli Serdang

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
07 Juli 2020	Acc	Revisi	
25 Februari 2021	Acc seminar hasil	Disetujui	

Medan, 18 Agustus 2021
 Dosen Pembimbing,



Rahmad Sembiring, SE.,M.SP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang. untuk mengetahui pengaruh produk domestic regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang, dan untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang, Menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Deli Serdang, dengan data dari tahun 2001 hingga tahun 2017 yang diambil melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Dalam penelitian ini variabel yang digunakan meliputi variabel upah minimum (X1), PDRB (X2), inflasi (X3), dengan penyerapan tenaga kerja (Y). Metode analisis data penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda (Ordinary Least Square) dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel yang signifikan mempengaruhi variabel penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang, yaitu semua variabel Inflasi, PDRB dan Upah minimum. Selanjutnya, variabel upah minimum, PDRB dan inflasi secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang, Kontribusi variabel-variabel tersebut sebesar 89,8 % dan sisanya sebesar 10,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya.

***Kata Kunci:* Inflasi, PDRB, Upah Minimum dan Penyerapan Tenaga Kerja**

ABSTRACT

This study aims to determine: to determine the effect of minimum wages on labor absorption in Deli Serdang Regency. To determine the effect of gross regional domestic product on labor absorption in Deli Serdang Regency, and to determine the effect of inflation on labor absorption in Deli Serdang Regency, Using a descriptive type of research with a quantitative approach. This research was conducted in Deli Serdang Regency, with data from 2001 to 2017 taken through the Central Statistics Agency of Deli Serdang Regency. In this study, the variables used include the minimum wage (X1), GRDP (X2), inflation (X3), with the absorption of energy. work (Y). The research data analysis method used multiple linear regression analysis (Ordinary Least Square) with a significance level of 5%. The results showed that partially the significant variables affecting the labor absorption variable in Deli Serdang Regency, namely all variables of inflation, GRDP and minimum wage. Furthermore, the variables of minimum wages, GRDP and inflation simultaneously (together) have an influence on labor absorption in Deli Serdang Regency. The contribution of these variables is 89.8% and the remaining 10.2% is explained by other variable variables.

Keywords: Inflation. GRDP, Minimum Wages and Labor Absorption

KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Inflasi, PDRB, Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Deli Serdang ”

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Bapak Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Bakhtiar Efendi, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Saimara A.M Sebayang, S.E., M.Si selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penelitian penulis serta memberikan berbagai saran agar penelitian yang dihasilkan menjadi semakin lebih baik.
5. Bapak Rahmad Sembiring SE., M. SP sebagai pembimbing II penulis yang memberikan banyak masukan dan arahan terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat lebih mudah menulis skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Sosial Sains Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kepada Suami tercintai. Anak-anak dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril, materil beserta doa dan dukungannya kepada penulis hingga selesainya skripsi saya ini.
8. Dan terima kasih untuk seluruh teman teman yang belum saya sebutkan namanya atas doa dan harapannya agar penulis bias menyelesaikan proposal ini dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila ada kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki penulisan skripsi ini di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak yang membutuhkan rujukan atau bahan bacaan di bidang Ekonomi Pembangunan.

Medan, Juni 2021

Penulis

Dewi Septiani Bako
NPM : 1615210053

DAFTAR ISI

No Judul	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	7
1. Identifikasi Masalah	8
2. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan teori	12
1. Penyerapan tenaga kerja	12
a. Teori Dasar Ketenagakerjaan	12
b. Pengertian tenaga kerja	13
c. Permintaan tenaga kerja	15
d. Fungsi Permintaan Tenaga Kerja	19
e. Permintaan Pasar Akan Tenaga Kerja	19
f. Hubungan inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja....	20
g. Hubungan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	21
h. Hubungan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.	21
2. Inflasi	22
a. Pengertian Inflasi	22
b. Jenis – Jenis Inflasi	26
c. Efek Inflasi	32
d. Indikator Inflasi.....	34
e. Penyebab Inflasi	35
f. Faktor Inflasi	36
g. Dampak Inflasi	40
3. PDRB	41

a.	Pengertian PDRB.....	41
b.	Cara perhitungan dan penyajian PDRB.....	43
4.	Upah minimum.....	46
a.	Definisi upah minimum.....	46
b.	Jenis jenis upah minimum.....	50
B.	Penelitian Sebelumnya.....	51
C.	Kerangka Konseptual.....	60
D.	Hipotesis.....	62
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Pendekatan Penelitian.....	63
B.	Definisi Operasional Variable.....	63
C.	Tempat Dan Waktu Penelitian.....	65
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	65
E.	Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian.....	70
1.	Deskripsi Objek Penelitian.....	70
a.	Gambaran Umum Daerah Penelitian	70
2.	Hasil Analisis Deskriptif Statistik.....	71
3.	Uji Asumsi Klasik.....	73
a.	Uji Normalitas Data.....	73
b.	Uji Multikolinearitas.....	74
c.	Uji Autokorelasi.....	75
4.	Uji Hipotesis.....	76
a.	Uji F.....	76
b.	Uji T.....	76
c.	Uji Determinasi.....	78
B.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	78
1.	Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	78
2.	Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	79
3.	Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	80
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.1	jumlah Angkatan kerja kabupaten deli serdang	2
1.2	inflasi selama 3 tahun terakhir	4
1.3	Upah Minimum kabupaten Deli Serdang 2015-2017	5
2.1	Daftar Penelitian Terdahulu	48
3.1.	Defenisi Operasionalisasi Variabel	61
3.2.	Skedul Proses Penelitian	62
4.1.	Descriptive Statistics	70
4.2.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	71
4.3.	Uji Multikolinearitas	72
4.4.	Uji autokorelasi	73
4.5.	Uji F	74
4.6.	Uji T	75
4.7.	Koefisien Determinasi (R ²)	76

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
2.1	Kerangka konseptual	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2014 mencapai 121,87 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebesar 1,41% (1,7 juta jiwa) dibandingkan keadaan pada Agustus 2013. Peningkatan angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja di dalam pasar bertambah, namun penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak selalu diiringi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,94% (7,24 juta jiwa).

Keadaan pasar tenaga kerja di Indonesia terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2014, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 252,7 juta jiwa, dimana 48,23% (121,9 juta jiwa) diantaranya menjadi bagian dari angkatan kerja. Jumlah lapangan kerja meningkat sebesar 1,7% dari bulan Agustus 2013 hingga Agustus 2014, angkatan kerja meningkat sebesar 1,4%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,47% pada periode yang sama. Meskipun TPT mengalami penurunan, namun penurunan nilai TPT tersebut masih kecil dibandingkan peningkatan angkatan kerja di Indonesia (ILO, 2015).

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga belum dapat dijadikan indikasi kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan seseorang akan tetap berusaha bekerja agar dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga tingkat pengangguran terbuka terlihat kecil. Permasalahannya adalah mereka yang terlihat bekerja tetapi tidak optimal atau tidak penuh, seperti jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, produktivitas rendah, upah rendah dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian atau sering disebut dengan pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh terdiri dari setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Pekerja tidak penuh di Indonesia dalam kurun waktu 2009-2019 cenderung mengalami fluktuasi. Persentase jumlah angkatan kerja tertinggi ada pada tahun 2018 yaitu sebesar 70.37% dan persentase partisipasi angkatan kerja terendah ada pada tahun 2015 yaitu sebesar 61.23%. (macroeconomic.feb.ugm.ac.id).

Kabupaten Deli Serdang merupakan kabupaten industri di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang memiliki tingkat partisipasi Angkatan kerja yang terlihat di tabel dibawah:

Table 1.1 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja kabupaten Deli Serdang Tahun 2009-2019

Tahun	Persentase TPAK
Jan 2009	55.9
Feb 2009	56.1
Mar 2009	56.3
Apr 2009	56.5
Mei 2009	56.7
Jun 2009	56.8
Jul 2009	57.0
...	...
...	...
...	...
Jul 2019	57.2
Agt 2019	56.8

Sep 2019	56.4
Okt 2019	55.9
Nop 2019	55.4
Des 2019	54.9

Sumber: BPS SUMUT

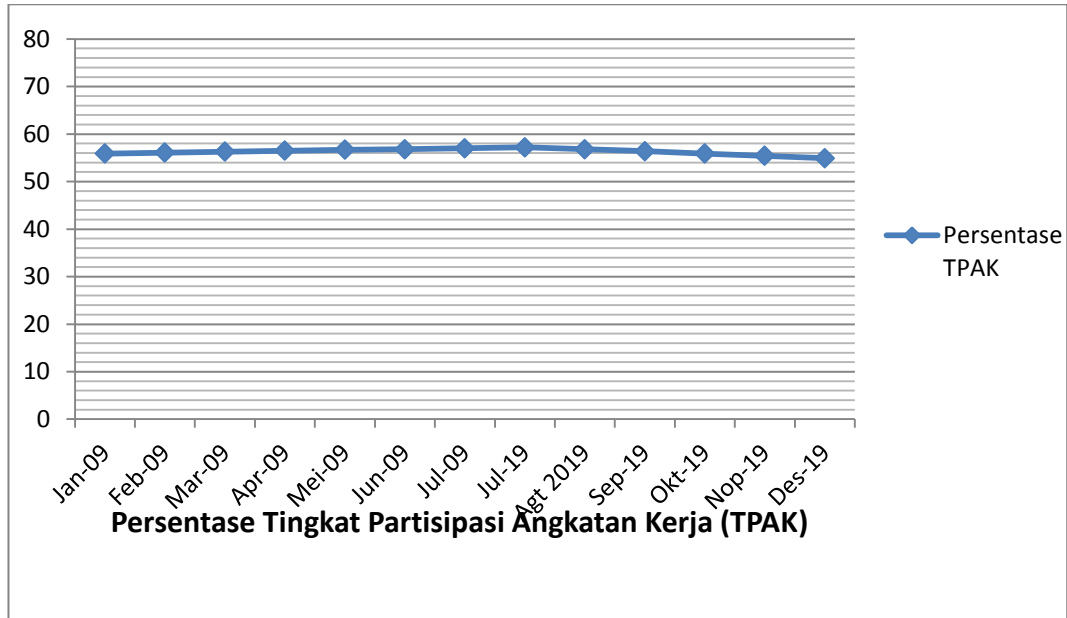


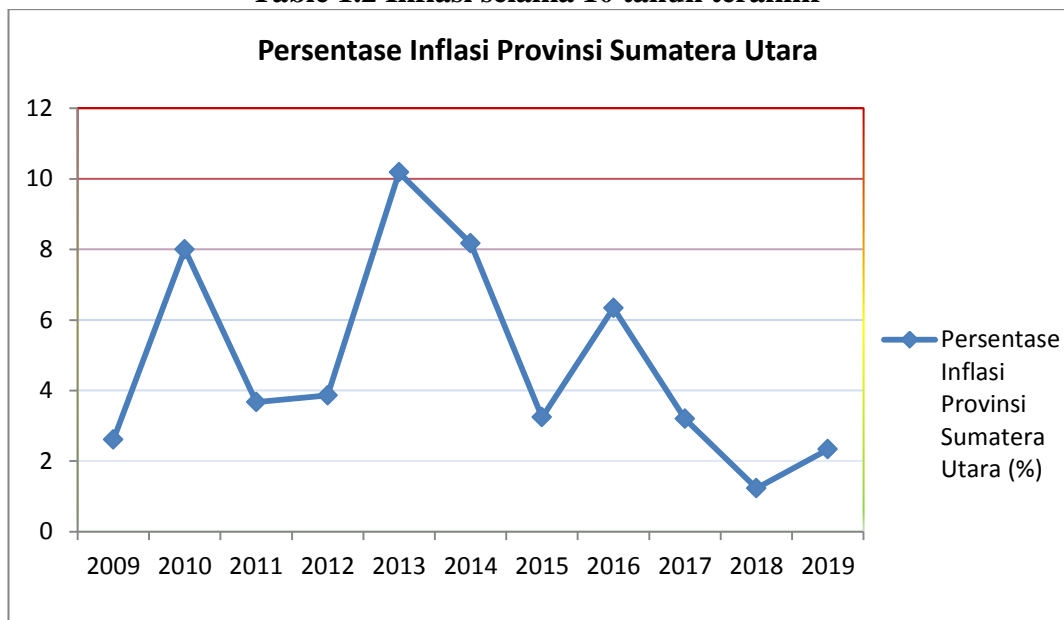
Table 1.1 di atas menjelaskan Mengenai data tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Deli Serdang tahun 2009 hingga tahun 2019 yang mana menunjukkan terjadinya fluktuasi TPAK di Kabupaten Deli Serdang. Tingkat partisipasi Angkatan kerja kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan di tahun 2015 sampai 2016.

Penelitian Ikka Dewi (2013) mengenai pengaruh investasi dan tingkat upah terhadap kesempatan kerja di Jawa Timur menemukan bahwa tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Ketika upah meningkat sebesar 1% maka kesempatan kerja juga meningkat sebesar 1,604143961. Peningkatan upah ditandai dengan meningkatnya konsumsi para pekerja sehingga terjadi kenaikan permintaan barang dan jasa. Kenaikkan permintaan barang dan jasa akan menyebabkan produksi barang dan jasa perusahaan meningkat, yang

pada akhirnya akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah secara tidak langsung dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana terjadi kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi memiliki tingkat yang berbeda dari satu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya (Sadono Sukirno, 2001:15). Boediono (2008:155) juga mendefinisikan inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus, akan tetapi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan kepada sebagian besar dari harga-harga barang lainnya. Berikut inflasi di provinsi sumatera utara.

Table 1.2 Inflasi selama 10 tahun terakhir
Persentase Inflasi Provinsi Sumatera Utara



Sumber: bps sumut

Table 1.2 di atas menjelaskan Mengenai data inflasi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 hingga tahun 2019 yang mana menunjukkan terjadinya fluktuasi Inflasi di Provinsi Sumatera Utara.

Kenaikan upah memang dapat meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan konsumsi, namun dalam beberapa kasus kenaikan upah justru berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Menurut Sumarsono (2003: 106) perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Gindling dan Terrel (2006) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tingkat upah memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana setiap 10% kenaikan upah minimum terjadi penurunan pekerja di masing-masing sektor sebesar 1,09%. Menurut Kuncoro (2002), kenaikan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Hal tersebut mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harganya lebih murah guna mempertahankan keuntungan. Kenaikan upah juga mendorong perusahaan meningkatkan harga per unit produk sehingga konsumen cenderung mengurangi konsumsi produk tersebut. Hal ini menyebabkan banyak hasil produksi yang tidak terjual, akibatnya produsen terpaksa mengurangi jumlah produksinya. Pengurangan jumlah produksi tersebut pada akhirnya akan mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan. Dapat di lihat di bawah Upah minimum di Provinsi Sumatera Utara dengan masa tertentu.

**Table 1.3 Upah Minimum kabupaten Deli Serdang
2011-2019**

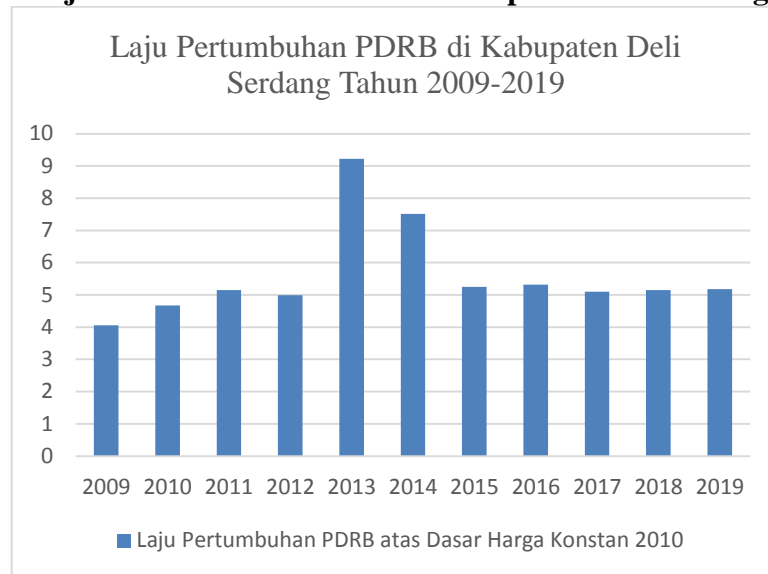
Tahun	Rp
2009	975.713
2010	989.930
2011	1.240.200
2012	1.380.300
2013	1,600,000
2014	1,800,000
2015	2,015,000
2016	2,246,725
2017	2,491,618
2018	2,720,100
2019	2,938,524

Sumber: BPS

Dari tabel di atas bahwa Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sesuai dengan tabel di atas, Maka dapat digambarkan kenaikan pada setiap tahunnya.

Selain upah, ada beberapa hal yang juga mendapat perhatian dari pemerintah sebagai upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yaitu produk domestik regional bruto dan investasi. Faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi (Feriyanto, 2014: 43).

Grafik 1.4 Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Deli Serdang 2009-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa pertumbuhan PDRB mengalami konsistensi dari tahun ketahun, namun terdapat di mana laju pertumbuhan yang paling tinggi dari 10 tahun tersebut berada pada tahun 2013, dimana dampak dari penurunan PDRB tersebut akan berakibat kepada penyerapan tenaga kerja dan sebagainya.

Perlambatan pertumbuhan PDRB di Kabupaten Deli Serdang tersebut tentunya akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas dan Neni (2009) menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang, apabila PDRB meningkat 1% maka penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 1,23%. Budi Utami (2009) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 1980-2007. Hal tersebut diperkuat hasil penelitian Ferdinan (2011) yang menyatakan bahwa

besarnya PDRB merupakan faktor signifikan dan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan PDRB maka penyerapan tenaga kerja juga akan menurun, begitu pun sebaliknya.

Berdasarkan masalah di atas dan adanya perbedaan hasil penelitian terutama pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Deli Serdang.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Terdapat kenaikan inflasi yang cukup signifikan di Provinsi Sumatera Utara pada kurun waktu 10 tahun yaitu pada tahun 2013
- b. Adanya kenaikan tingkat pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi di Tahun 2013 dimana hal ini bertepatan dengan kenaikan inflasi yang tinggi.
- c. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup rendah di kabupaten Deli Serdang yang notabene nya sebagai kabupaten dengan sektor industri terbesar di Provinsi Sumatera Utara.

2. Batasan Masalah

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi pada Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Deli Serdang.
2. Apakah PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Deli Serdang.
3. Apakah Upah Minimum berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Deli Serdang.
4. Apakah Inflasi, PDRB dan Upah Minimum mempengaruhi secara simultan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Deli Serdang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Deli Serdang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Deli Serdang.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Deli Serdang.
- d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum secara serempak terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Deli Serdang.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

penelitian ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Panca Budi. Selain itu dari penelitian ini diharapkan penulis dapat mengerti Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di kabupaten Deli Serdang.

b. Bagi Akademisi

penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai ketenagakerjaan.

c. Bagi pemerintah

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi kebijakan dan pengambil keputusan dalam merumuskan dan merencanakan arah pembangunan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini sebelumnya dari penelitian Febryana Rizqi Wasilaputri (2016) Universitas Negeri Yogyakarta yang Berjudul Pengaruh Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014 Sedangkan penelitian ini berjudul Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang. Perbedaan anatar kedua penelitian ini dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

	<p>Penelitian</p> <p>Febryana R Wasilaputri</p> <p>(2016)</p> <p>Universitas Negeri</p> <p>Yogyakarta</p>	<p>Penelitian</p> <p>Dewi Septiani Bako (2020)</p> <p>Universitas Pembangunan</p> <p>Panca Budi</p>
<p>Variabel</p> <p>Penelitian</p>	<p>Upah Minimum (X1)</p> <p>PDRB (X2)</p> <p>Investasi (X3)</p> <p>Penyerapan tenaga Kerja (Y)</p>	<p>Inflasi (X1)</p> <p>PDRB (X2)</p> <p>Upah Minimum (X3)</p> <p>Penyerapan tenaga Kerja (Y)</p>
Lokasi Penelitian	Pulau Jawa	Kabupaten Deli Serdang
Waktu Penelitian	tahun 2016	tahun 2020

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Penyerapan tenaga kerja

a. Teori Dasar Ketenagakerjaan

Teori Keynes

Tokoh ekonomi John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (labor union) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai Keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunya harga-harga. Apabila harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjinal labor (marginal value of productivity of labor) yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam mempekerjakan labor akan turun. Jika penurunan harga tidak begitu besar maka kurva nilai produktivitas hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga kerja yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan.

Pekerja semata-mata ditentukan dari aspek perusahaan dengan tingkat upah masa lalu yang given. Teori ini banyak yang melandasi pemikiran tenaga kerja Keynesian. Menurut teori excess supply dan demand akan tetap

ada, karena pengurangan pengangguran semata-mata ditentukan oleh kebutuhan perusahaan. Perusahaan akan memberikan tingkat upah sesuai dengan *marginal revenue product of labor*. Atau secara matematis dapat ditulis dengan

$$\text{MRPL} = w$$

Dimana MRPL adalah *marginal revenue product of labor* dan w tingkat upah. w juga dapat menggambarkan *opportunity cost of time labor*.

b. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dalam proses tersebut tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari usaha yang telah dilakukan yakni upah. Maka pengertian permintaan tenaga kerja adalah tenaga kerja yang di minta oleh pengusaha pada berbagai tingkat upah (Boediono,1982). Dipasar tenaga kerja apabila terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja atau jumlah pengangguran meningkat dan jumlah pencari kerja bertambah, maka tingkat upah akan turun. Demikian pula sebaliknya apabila terjadi kelebihan permintaan tenaga kerja atau penawaran tenaga kerja menurun maka tingkat upah akan meningkat (Lipsey,2000). Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara kuantitas tenaga kerja dengan tingkat upah. Dimana, produsen hanya akan membeli tenaga kerja yang dibutuhkan agar mendapatkan keuntungan. Apabila input tenaga kerja ditambahkan maka produsen tidak akan mendapatkan keuntungan yang diinginkan (Arsyad,1997).

Dari teori perilaku produsen diketahui bahwa posisi keuntungan maksimum produsen tercapai apabila memenuhi syarat:

$$MR = MC$$

Keterangan:

$MR = \textit{Marginal Revenue}$

$MC = \textit{Marginal cost}$

MR merupakan nilai rupiah produksi marginal yang diperoleh dari mengalikan harga produk yang berlaku dengan produksi maksimal. Bila perusahaan menggunakan garis wage rate sebagai dasar maka tambahan biaya yang harus dibayarkan perusahaan adalah sama dengan tingkat upah (w) yang berfungsi sebagai MC adalah w . Dari kondisi tersebut maka perusahaan akan terus menambah jumlah tenaga kerja jika $MR > w$.

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh perusahaan untuk dipekerjakan. Dalam kurva permintaan tenaga kerja menggambarkan jumlah maksimal tenaga kerja yang seorang pengusaha bersedia untuk menggambarkan pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu (Afrida, 2003).

Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Pada awalnya batasan umur penggolongan tenaga kerja di Indonesia sejak tahun 1971 adalah bila mana seseorang sudah berumur 10 tahun atau lebih. Pemilihan batasan umur ini berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk bekerja atau mencari pekerjaan. Dengan bertambahnya kegiatan pendidikan dan penetapan kebijakan wajib belajar 9 tahun, maka jumlah penduduk dalam usia sekolah yang bekerja berkurang. Oleh karena itu, semenjak dilaksanakan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) tahun 2001, batas umur penggolongan kerja

yang semula 10 tahun atau lebih diubah menjadi 15 tahun atau lebih. Indonesia tidak menggunakan batas umur maksimum dalam pengelompokan usia kerja karena belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan dihari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta (Simanjuntak, 2001).

Tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan bekerja serta golongan menganggur dan mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerjayang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai angkatan kerja potensial (Simanjuntak, 2001).

c. Permintaan tenaga kerja

Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang itu memberikan nikmat (*utility*) kepada si pembeli sementara pengusaha memperkerjakan seseorang karena orang itu membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Dengan kata lain

pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat akan barang yang di produksinya.

Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Hal ini berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang dan jasa karena barang itu memberikan nikmat (utility) kepada pembeli sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena untuk membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari kenaikan permintaan konsumen akan barang yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja seperti itu disebut *derived demand* atau permintaan turunan (Simanjuntak, 2001).

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil (Sumarsono, 2003). Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh:

- 1) Perubahan tingkat upah

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon

yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama sekali. Akibatnya banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau scale effect.

- b) Pengusaha lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan tenaga kerja dengan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Kondisi seperti ini terjadi apabila upah naik dengan asumsi harga barang-barang modal lainnya tetap. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja.

Baik efek skala produksi maupun efek substitusi akan menghasilkan suatu bentuk kurva permintaan tenaga kerja yang mempunyai slope negatif.

- 2) Perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya, untuk maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

- 3) Harga barang modal turun Apabila harga barang modal turun maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksinya karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat pula.

Pada negara yang berkembang proporsi kesempatan kerja di sector pertanian sangat dominan, sedangkan sektor jasa belum begitu berkembang. Itu dikarenakan pada Negara berkembang masih kurangnya sumber daya manusia untuk industrialisasi, karena penggunaan teknologi yang kurang berkembang.

Simanjuntak (1996) mengatakan bahwa laju pertumbuhan pendapatan nasional dan kesempatan kerja juga menunjukkan perbedaan elastisitas masing masing sektor untuk penyerapan tenaga kerja. Untuk memperluas kesempatan diperlukan kebijakan terpadu yang bersifat umum, sektoral, regional maupun langkah – langkah yang bersifat khusus. Langkah-langkah yang bersifat umum antara lain meliputi kebijakan fiskal, moneter, dan kebijaksanaan sektoral antara lain pendidikan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan disemua sector ekonomi, penentuan skala prioritas investasi, serta pemilihan teknologi yang tepat guna. Langkah-langkah yang bersifat khusus antara lain meliputi program-program bantuan bangunan dan proyek padat karya.

Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan atau demand dalam masyarakat. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat upah. Proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja dinamakan pasar kerja. Seorang dalam pasar kerja berarti orang tersebut menawarkan jasa untuk produksi, apakah

orang tersebut sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Besarnya penempatan jumlah orang yang bekerja dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut.

Selanjutnya, besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Dalam ekonomi Neo-klasik permintaan kerja di asumsikan bahwa penyediaan atau penawaran tenaga kerja akan bertambah apabila tingkat upah bertambah.

d. Fungsi Permintaan Tenaga Kerja

Perusahaan, yang mengalami kenaikan permintaan output, akan menambah jumlah input perusahaan yang diminta. Dengan kata lain, permintaan input adalah permintaan turunan sebagaimana dikemukakan oleh ahli ekonomi Alfred Marshall sebagai *derived demand* atau permintaan turunan. Permintaan akan output sendiri dianggap sebagai “permintaan asli” karena timbul langsung dari peningkatan kebutuhan manusia (Boediono, 1982, 89).

e. Permintaan Pasar Akan Tenaga Kerja

Kurva permintaan menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dipilih perusahaan untuk digunakan pada berbagai macam alternatif tingkat upah. Ruang lingkup pasar itu tergantung pada asumsi yang kita buat tentang sifat pasar itu (Bellante and Jackson, 1983: 45 – 46). Antara lain sebagai berikut :

- 1) Semua tenaga kerja adalah homogeneity. Ini berarti pekerja mempunyai tingkat keterampilan yang sama dan dapat beralih dari satu pekerjaan lainnya dalam ekonomi tanpa memerlukan biaya latihan kerja. Para pengusaha akan

menganggap semua pekerja sebagai pengganti yang sempurna bagi setiap pekerja lainnya.

- 2) Semua pekerja memiliki pengetahuan dan mobilitas yang sempurna. Jadi, umpamanya semua pekerja memiliki pengetahuan yang sempurna tentang kesempatan kerja meliputi seluruh ekonomi dan tidak terdapat biaya pindah dari satu lokasi geografis ke lokasi yang lain, baik bagi karyawan maupun bagi majikan.
- 3) Semua pekerjaan diasumsikan sebagai sama dapat disepakati (atau tidak disepakati).
- 4) Semua majikan bersaing sepenuhnya, baik dalam pasar produk maupun pasar bagi factor produksi.

f. Hubungan inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Inflasi yang terjadi pada perekonomian memiliki beberapa dampak yang diantaranya adalah inflasi menyebabkan perubahan output dan tenaga kerja. Dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitasi inflasi terjadi. Perusahaan akan menambah jumlah output apabila masih terjadi inflasi ringan. Keinginan perusahaan menambah output tentu juga dibarengi penambahan faktor produksi seperti tenaga kerja. Dengan kondisi itu maka permintaan akan tenaga kerja akan meningkat yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan akan mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional (Nanga, 2005).

g. Hubungan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Produk regional domestik bruto (PDRB) dapat dilihat sebagai perekonomian total. Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan kerja baru dan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan penggunaan tenaga kerja guna untuk meningkatkan faktor produksi perusahaan tersebut. Dengan demikian akan dapat mengurangi jumlah angka pengangguran jika terjadi peningkatan tenaga kerja (Mankiw, 2000). Jika produk domestik regional bruto meningkat maka permintaan jumlah tenaga kerja juga akan meningkat, dimana peningkatan produk domestik regional bruto berbanding dengan naiknya pertumbuhan ekonomi sehingga kemakmuran masyarakat juga bertambah. Ketika kemakmuran masyarakat bertambah akan menyebabkan banyaknya atau tersedianya lowongan pekerjaan yang berdampak akan mengurangi angka pengangguran (Lincoln, 1997).

h. Hubungan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Kenaikan tingkat upah rata-rata, maka akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang di minta, berarti akan terjadi pengangguran. Begitu pula sebaliknya, dengan turunnya tingkat upah akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah (Ehrenbeg, 1998).

Ada 2 penyebab terjadinya permintaan tenaga kerja yaitu:

- 1) Scale Effect

Karena adanya peningkatan tingkat upah tenaga kerja akan meningkatkan biaya produksi perusahaan yang berdampak pada peningkatan harga output perusahaan. Dengan adanya peningkatan harga pada produk maka konsumen akan memberikan respon yaitu dengan mengurangi tingkat konsumsinya atau tidak melakukan konsumsi pada produk tersebut. Akibatnya banyak produk yang tidak akan terjual sehingga produsen akan menurunkan harga produknya yang kemudian akan mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja yang akan dibutuhkan.

2) Substitution Effect

Karena adanya perubahan upah menyebabkan harga relatif faktor produksi ikut berubah, sehingga komposisi penggunaan input / faktor produksi modal / tenaga kerja ikut berubah. Misalnya, upah naik sedangkan harga capital tetap, maka harga / upah tenaga kerja lebih tinggi dari modal. Akibatnya produsen menggunakan modal lebih banyak dan menggunakan tenaga kerja lebih sedikit (Ehrenbreg, 2000).

2. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). Dari definisi ini ada tiga syarat untuk dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Pertama, adanya kenaikan harga. Kedua, kenaikan tersebut terjadi terhadap harga-harga barang secara umum. Ketiga, kenaikan tersebut berlangsung cukup lama. Dengan demikian kenaikan harga yang terjadi pada hanya satu

jenis barang, atau kenaikan yang terjadi hanya sementara waktu tidak dapat disebut dengan inflasi.

Para ekonom mendefinisikan inflasi secara berbeda-beda namun mempunyai inti yang sama yaitu kenaikan harga-harga yang cenderung naik secara terus menerus. Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya tingkat harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga-harga disebabkan oleh faktor-faktor musiman (misalnya menjelang peringatan hari-hari besar), atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi (Kalalo, dkk 2016).

Inflasi didefinisikan dengan banyak ragam yang berbeda, tetapi semua definisi itu mencakup pokok-pokok yang sama. Samuelson (2001) memberikan definisi bahwa inflasi sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan tingkat harga umum, baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Dari definisi tersebut mengindikasikan keadaan melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara.

Sukirno (2011:165) menyatakan bahwa pengertian inflasi sebagai berikut: “Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus”.

Sedangkan menurut Julius (2011:22) menyatakan bahwa pengertian inflasi sebagai berikut: “Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara terus menerus”.

Selanjutnya menurut Murni (2013:202) menyatakan bahwa pengertian inflasi sebagai berikut: “Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus”.

Sementara definisi lain menegaskan bahwa inflasi terjadi pada saat kondisi ketidakseimbangan (disequilibrium) antara permintaan dan penawaran agregat, yaitu lebih besarnya permintaan agregat daripada penawaran agregat. Dalam hal ini tingkat harga umum mencerminkan keterkaitan antara arus barang atau jasa dan arus uang. Bila arus barang lebih besar dari arus uang maka akan timbul deflasi, sebaliknya bila arus uang lebih besar dari arus barang maka tingkat harga akan naik dan terjadi inflasi.

Secara umum pendapat ahli ekonomi menyimpulkan bahwa inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli dari nilai uang terhadap barang-barang dan jasa, besar kecilnya ditentukan oleh elastisitas permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Faktor lain yang juga turut menentukan fluktuasi tingkat harga umum diantaranya adalah kebijakan pemerintah mengenai tingkat harga, yaitu dengan mengadakan kontrol harga, pemberian subsidi kepada konsumen dan lain sebagainya.

Dari definisi yang ada tentang inflasi dapatlah ditarik tiga pokok yang terkandung di dalamnya (Gunawan, 1991), yaitu :

- 1) Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat.
- 2) Peningkatan harga tersebut berlangsung terus menerus, bukan terjadi pada suatu waktu saja.
- 3) Mencakup tingkat harga umum (general level of prices) yang berarti tingkat harga yang meningkat itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja.

Menurut Boediono (1999) inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara menyeluruh dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan pada sebagian besar harga barang-barang lain yaitu harga makanan, harga makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, harga sandang, harga kesehatan, harga pendidikan, rekreasi, dan olahraga, harga transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Dari definisi tersebut, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan terjadi inflasi, yaitu :

- 1) Kenaikan harga, yaitu apabila harga suatu komoditas menjadi lebih tinggi dari harga periode sebelumnya.
- 2) Bersifat umum, yaitu kenaikan harga komoditas secara umum yang dikonsumsi masyarakat bukan merupakan

kenaikan suatu komoditas yang tidak menyebabkan harga naik secara umum.

- 3) Berlangsung terus menerus, kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadi sesaat misalnya kenaikan harga pada saat lebaran atau tahun baru bukan merupakan inflasi.

Pandangan kaum moneteris menganggap inflasi sebagai akibat dari jumlah uang yang beredar yang terlalu banyak, sehingga daya beli uang tersebut (*purchasing power of money*) menurun. Algifari, G. M. (1998). Sebagai akibatnya harga barang-barang menjadi naik. Sedangkan menurut kaum strukturalis, inflasi merupakan gejala ekonomi yang disebabkan oleh masalah struktural seperti masalah gagal panen yang menyebabkan kekurangan persediaan barang, sehingga tidak dapat memenuhi jumlah permintaan secara keseluruhan. Sebagai akibat harga barang tersebut mengalami kenaikan.

b. Jenis – Jenis Inflasi

Inflasi yang terjadi dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, sebab terjadinya, dan berdasarkan asalnya.

1) Inflasi Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu:

- 1) Inflasi Rendah (*Creeping Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam ekonomi karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa.

- 2) Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, dan 30%.
 - 3) Inflasi Berat (*High Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun.
 - 4) Inflasi Sangat Tinggi (*Hyperinflation*), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya turun sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.
- 2) Inflasi Berdasarkan Sebabnya
- 1) *Demand Pull Inflation*. Inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi. Akibatnya sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan banyak sementara penawaran tetap, harga akan naik. Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.
 - 2) *Cost Push Inflation*. Inflasi ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Akibat naiknya biaya faktor produksi, dua hal

yang dapat dilakukan oleh produsen, yaitu langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga produknya naik karena penurunan jumlah produksi.

3) *Bottle Neck Inflation*. Inflasi ini dipicu oleh faktor penawaran (*supply*) atau faktor permintaan (*demand*). Jika dikarenakan faktor penawaran maka persoalannya adalah sekalipun kapasitas yang ada sudah terpakai tetapi permintaannya masih banyak sehingga menimbulkan inflasi. Adapun inflasi karena faktor permintaan disebabkan adanya likuiditas yang lebih banyak, baik itu berasal dari sisi keuangan (*monetary*) atau akibat tingginya ekspektasi terhadap permintaan baru.

3) Inflasi Berdasarkan Asalnya

a) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*). Inflasi ini timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya, biasanya pemerintah melakukan kebijakan mencetak uang baru.

b) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*). Inflasi ini timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang utama (antara lain disebabkan melemahnya nilai tukar) yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi

biasanya akan disertai dengan kenaikan harga-harga barang.

Wijayanta, B., & Widyaningsih, A. (2001).

Penggolongan inflasi berdasarkan sifatnya dapat dilihat dari berbagai tingkatan yaitu:

1) inflasi ringan(*creeping inflation*)

Inflasi ringan ditandai dengan laju inflasi yang rendah(kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan presentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

2) Inflasi sedang/menengah(*galloping inflation*)

Inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya duobledigit atau bahkan tripledigit, diantara 10%-30% per tahun) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi ringan.

3) Inflasi berat

Inflasi berat merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali (lebih dari 30% per tahun). Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi.

Menurut M. Natsir (2014:261) jenis-jenis inflasi yaitu:

- 1) Inflasi secara umum, terdiri dari:
 - a) Inflasi IHK atau inflasi umum (headline inflation) adalah inflasi seluruh barang dan jasa yang dimonitor harganya secara periodik. Inflasi IHK merupakan gabungan dari inflasi inti, inflasi harga administrasi dan inflasi gejala barang (volatile goods).
 - b) Inflasi inti (core inflation) adalah inflasi barang dan jasa yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum (faktor-faktor fundamental misalnya akseptasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran) yang akan berdampak pada perubahan harga-harga secara umum yang sifatnya cenderung permanen dan persisten.
 - c) Inflasi harga administrasi (administered price inflation) adalah inflasi yang harganya diatur oleh pemerintah terjadi karena campur tangan (diatur) pemerintah, misalnya kenaikan harga BBM, angkutan dalam kota dan kenaikan tarif tol.
 - d) Inflasi gejala barang-barang (volatile goods inflation) adalah inflasi kelompok komoditas (barang dan jasa) yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Misalnya, bahan makanan yang bergejolak terjadi pada kelompok bahan makanan yang dipengaruhi faktor-faktor teknis, misalnya gagal panen, gangguan alam atau anolai cuaca.

- 2) Inflasi berdasarkan asalnya, terdiri dari:
 - a) Inflasi yang berasal dari dalam negeri adalah inflasi barang dan jasa secara umum di dalam negeri.
 - b) Inflasi yang berasal dari manca negara adalah inflasi barang dan jasa (barang dan jasa yang diimpor) secara umum di luar negeri
- 3) Inflasi berdasarkan cakupan pengaruhnya, terdiri dari:
 - a) Inflasi tertutup (closed inflation) adalah inflasi yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau beberapa barang tertentu.
 - b) Inflasi terbuka (open inflation) adalah inflasi yang terjadi pada semua barang dan jasa secara umum.
- 4) Inflasi berdasarkan sifatnya, terdiri dari:
 - a) Inflasi merayap (creeping inflation) adalah inflasi yang rendah dan berjalan lambat dengan presentase yang relatif kecil serta dalam waktu yang relatif lama.
 - b) Inflasi menengah (galloping inflation) adalah inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan seringkali berlangsung dalam periode waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi.
 - c) Inflasi tinggi (hiper inflasi) adalah inflasi yang paling parah ditandai dengan kenaikan harga mencapai 5 atau 6 kali, pada saat ini nilai uang merosot tajam.
- 5) Inflasi berdasarkan tingkat pengaruhnya
 - a) inflasi ringan adalah inflasi yang besarnya $<10\%$ per tahun

- b) Inflasi sedang adalah inflasi yang besarnya antara 10%-30% per tahun
 - c) Inflasi berat adalah inflasi yang besarnya antara 30%-100% per tahun
 - d) Inflasi hiper adalah yang besarnya $>100\%$ per tahun.
- 6) Inflasi berdasarkan periode, terbagi menjadi tiga, antara lain:
- a) Inflasi tahunan (year on year), yaitu mengukur IHK periode bulan ini terhadap IHK di periode bulan yang sama di tahun sebelumnya.
 - b) Inflasi bulanan (month to month), mengukur IHK bulan ini terhadap IHK bulan sebelumnya.
 - c) Inflasi kalender atau (year to date), mengukur IHK bulan ini terhadap IHK awal tahun”.

c. Efek Inflasi

Menurut Nopirin (2010) inflasi dapat menimbulkan efek bagi pemerintahan maupun kondisi politik. Efek-efek inflasi tersebut adalah :

1) Efek terhadap pendapatan

Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi, demikian juga orang yang menumpuk kekayaan dalam bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. Sebaliknya pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang

mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan persentase lebih besar dari laju inflasi. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji tetap Rp 3.000.000 dapat membelanjakan berbagai barang dan jasa, namun dengan adanya inflasi gaji tersebut hanya dapat dibelanjakan beberapa barang dan jasa

2) Efek terhadap efisiensi

Permintaan terhadap barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain karena inflasi, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien. Misalnya seseorang yang berprofesi sebagai produsen roti, sebelum adanya inflasi untuk memproduksi 1 roti hanya dibutuhkan biaya Rp 5000, namun dengan adanya inflasi yang mengakibatkan harga bahan baku roti mahal sehingga biaya Rp 5000 sudah tidak mencukupi untuk memproduksi 1 roti.

3) Efek terhadap output

Inflasi dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju

inflasi cukup tinggi dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan output.

d. Indikator Inflasi

Menurut Bank Indonesia mengemukakan bahwa Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice antara lain:

- 1) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga perdagangan besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.
- 2) Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu

ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

e. Penyebab Inflasi

Inflasi dapat digolongkan karena penyebab-penyebabnya yaitu sebagai berikut:

- i. *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*. *Natural Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. *Human Error Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.
- ii. *Actual / Anticipated / Expected Inflation* dan *Unanticipated / Unexpected Inflation*. Pada *Expected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi. Sedangkan pada *Unexpected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.
- iii. *Demand Pull* dan *Cost Push Inflation*. *Demand Pull* diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi Permintaan *Agregatif* (AD) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. *Cost Push Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi Penawaran *Agregatif* (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

- iv. *Spiralling Inflation*. Inflasi jenis ini adalah inflasi yang diakibatkan inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi begitu seterusnya.
- v. *Imported Inflation* dan *Domestic Inflation*. *Imported Inflation* adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi price taker dalam pasar internasional. *Domestic Inflation* bisa dikatakan inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya.

f. Faktor Inflasi

1) Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika

Menurut Sadono Sukirno (2011: 21) kurs atau lebih dikenal dengan istilah nilai tukar merupakan sebuah istilah dalam bidang keuangan. Kurs memiliki pengertian sebagai nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat atau sebaliknya. Kurs atau nilai tukar terdiri atas dua bagian yaitu kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah harga jual mata uang valuta asing oleh bank atau money changer, sedangkan kurs beli adalah kurs yang diberlakukan bank jika melakukan pembelian mata uang valuta asing.

Kurs mata uang asing mengalami perubahan nilai yang terus menerus dan relatif tidak stabil. Perubahan nilai ini dapat terjadi karena adanya perubahan permintaan dan penawaran atas suatu nilai mata uang asing pada masing-masing pasar pertukaran

valuta (pasar valuta asing) dari waktu ke waktu. Sedangkan perubahan permintaan dan penawaran itu sendiri dipengaruhi oleh adanya kenaikan relatif tingkat bunga, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap negara.

Kurs mata uang menunjukkan harga mata uang apabila ditukarkan dengan mata uang lain. Penentuan nilai kurs mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain ditentukan sebagaimana halnya barang yaitu oleh permintaan dan penawaran mata uang yang bersangkutan. Hukum ini juga berlaku untuk kurs rupiah, jika permintaan akan rupiah lebih banyak daripada penawarannya maka kurs rupiah akan terapresiasi, demikian pula sebaliknya. Apresiasi atau depresiasi akan terjadi apabila negara menganut kebijakan nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate) sehingga nilai tukar akan ditentukan oleh mekanisme pasar.

2) Indeks Harga Konsumen

Menurut Mankiw, Quah & Wilson (2012), Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga barang-barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam suatu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (weighted) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar.

3) Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan yang mensubsidi dan mengatur penjualan bahan bakar bensin, solar, dan minyak tanah secara eceran adalah PT Pertamina (Persero), (wikipedia.org). Harga BBM dapat mempengaruhi kinerja ekonomi di Indonesia, karena harga BBM sebagai komoditas penting yang digunakan hampir setiap orang. Harga bahan bakar minyak juga menjadi penentu bagi besar kecilnya defisit anggaran. Tetapi harga bahan bakar minyak pada sisi yang lain dapat membebani rakyat miskin, apabila penetapannya tergolong tinggi. Tak jarang penetapan harga bahan bakar minyak selalu diikuti kenaikan harga-harga bahan lainnya, walaupun tidak ada komando bagi kenaikannya sebagaimana kenaikan harga bahan bakar minyak.

4) Tarif Tenaga Listrik (TTL)

Tarif tenaga listrik atau biasa disingkat TTL, adalah tarif yang boleh dikenakan oleh pemerintah untuk para pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN adalah satu-satunya perusahaan yang diperbolehkan untuk menjual listrik secara langsung kepada masyarakat Indonesia, maka TTL bisa dibilang adalah tarif untuk penggunaan listrik di Indonesia. Pada awal 2008, diberlakukan tarif non subsidi untuk pelanggan listrik dengan daya 6600 Volt Ampere (VA) keatas, dan sejak 1 Juli 2010, pemerintah

memutuskan menaikkan TTL rata-rata 10%. Hal ini didasarkan pada Pasal 8UU No.2 Tahun 2010 (wikipedia.org).

Menurut M. Natsir (2014:255) faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi, inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan, sisi penawaran maupun ekspektasi. Yaitu:

- 1) “Kedua yang menyebabkan inflasi adalah faktor penawaran dan kenaikan harga-harga (inflasi) yang ditimbulkan dinamakan sebagai cost push inflation atau shock inflation. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan Inflasi karena tarikan permintaan (demand pull inflation)

Inflasi karena tarikan permintaan yaitu kenaikan harga-harga yang timbul sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran domestik dalam jangka panjang.

- 2) Inflasi karena dorongan biaya (cost push inflation)

Faktor jasa akibatnya, produsen harus menaikkan harga supaya pendapatan keuntungan (laba) dan kegiatan produksi bisa berlanjut terus dalam jangka panjang (sustainable).

- 3) Inflasi karena ekspektasi

Ekspektasi inflasi sangat berpengaruh dalam pembentukan harga dan upah tenaga kerja. Jika para pelaku ekonomi, baik individu, dunia usaha berfikir bahwa laju inflasi pada periode lalu masih akan terjadi di masa yang akan datang, maka para pelaku ekonomi akan melakukan antisipasi untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul. Para pelaku usaha akan memperhitungkan biaya produksi

dengan kenaikan tingkat harga seperti pada waktu yang lalu (suseno dan Astiyah, 2009 dalam M. Natsir, 2014)”.

g. Dampak Inflasi

Dampak inflasi terhadap suatu perekonomian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin rendah. Penurunan daya beli mata uang selanjutnya akan berdampak pada individu, dunia usaha dan APBN. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan.
- 2) Inflasi mendorong redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat, hal inilah yang disebut dengan efek redistribusi dari inflasi. Inflasi akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akibat inflasi akan mengakibatkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil yang lain akan jatuh. Umumnya bagi mereka yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri akan mengalami dampak negatif inflasi, hal tersebut dikarenakan inflasi yang tinggi pendapatan riil mereka akan turun.
- 3) Inflasi menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja. Hal tersebut terjadi dikarenakan inflasi memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini.
- 4) Inflasi menyebabkan sebuah lingkungan yang tidak stabil bagi kondisi ekonomi. Jika konsumen memperkirakan tingkat inflasi di

masa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara besar-besaran pada saat sekarang dari pada mereka menunggu tingkat harga sudah meningkat lagi.

- 5) Inflasi cenderung memperendah tingkat bunga riil dan menyebabkan terjadinya ketidak seimbangandi pasar modal. Hal tersebut menyebabkan penawaran dana untuk investasi menurun, dan sebagai akibatnya, investor sektor swasta berkurang sampai ke bawah tingkat keseimbangannya.

3. PDRB

a. Pengertian PDRB

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk domestik regional bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor- faktor produksi di daerah tersebut.

Di negara-negara berkembang, yang sering juga dinamakan “Dunia Ketiga” konsep Produk Domestik Bruto adalah konsep yang paling penting jika dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. Menurut Sukirno (2013:34) dalam bukunya makroekonomi teori pengantar, Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai

barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara dalam satu tahun tertentu.

Produk Domestik Bruto atau dalam bahasa Inggrisnya Gross Domestic Product(GDP) adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara dan negara asing. (Sukirno, 2013:35)

Produk Domestik Brutoatas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut.Sedangkan pada harga tetap yaitu harga yang berlaku pada tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain.

Menurut Mankiw (2007:17), tujuan Produk Domestik Bruto adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu.

Ada dua cara dalam melihat statistik ini. Salah satunya adalah dengan melihat Produk Domestik Bruto sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian. Cara lain untuk melihat Produk Domestik Bruto adalah sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Dari kedua sudut pandang, jelaslah mengapa Produk Domestik Bruto merupakan cerminan dari kinerja ekonomi. Produk Domestik

Bruto mengukur sesuatu yang dipedulikan banyak orang. Demikian pula, perekonomian dengan output barang dan jasa yang besar bisa secara baik memenuhi permintaan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah (Mankiw, 2007:17).

Menurut Sadono Sukirno(2013:33), untuk menghitung nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan oleh sesuatu perekonomian ada tiga cara perhitungannya yang dapat digunakan, yaitu:

- 1) Cara Pengeluaran. Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran/perbelanjaan ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut.
- 2) Cara produksi atau cara produk neto. Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian.
- 3) Cara pendapatan. Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

b. Cara perhitungan dan penyajian PDRB

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah

tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

2) Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan merupakan suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh melalui penjumlahan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap produksi. Pendapatan nasional yang dimaksud diperoleh melalui penjumlahan dari berbagai unsur dan jenis pendapatan, diantaranya:

- a) Kompensasi untuk pekerja terdiri dari upah (wages) dan gaji (salaries) ditambah faktor lain terhadap upah dan gaji (misalnya, rencana dari pengusaha dalam hal pensiun dan dana jaminan sosial).
- b) Keuntungan perusahaan merupakan kompensasi kepada pemilik perusahaan yang mana digunakan untuk membayar pajak keuntungan perusahaan, dibagikan kepada para pemilik saham sebagai deviden dan ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.
- c) Pendapatan usaha perorangan merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari *self employed person*, *self employed professional* dan lain-lain.
- d) Pendapatan sewa merupakan kompensasi yang untuk pemilik tanah, *rental business* dan *residential properties*.
- e) Bunga netto atau net interest terdiri dari bunga yang dibayarkan perusahaan dikurangi bunga yang diterima oleh perusahaan

ditambah bunga netto yang diterima dari luar negeri, bunga yang dibayar pemerintah dan konsumen tidak termasuk didalamnya

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilah dan pajak lainnya.

3) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran merupakan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan perekonomian dan diukur pada harga pasar yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen-komponen tersebut meliputi:

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b) Konsumsi pemerintah.
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d) Perubahan stok.
- e) Ekspor netto.

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disusun dalam dua bentuk, yaitu:

- a) PDRB atas dasar harga yang berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun.

PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

- b) PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, dimana faktor perubahan harga telah dikeluarkan.

Pada tahun 2010, Badan Pusat Statistik mengubah harga tahun dasar, yang semula tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun 2000 karena beberapa alasan berikut:

- a) Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk produk baru.
- b) Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan dan metodologi sesuai rekomendasi dalam *System of National Account* (SNA) 2008.
- c) Perekonomian Indonesia relatif stabil.

4. Upah minimum

a. Definisi upah minimum

Upah Minimum Regional adalah standart terendah yang digunakan para pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pegawai atau karyawan dalam lingkup perusahaannya. Pemerintah mengatur melalui

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.

Penetapan upah awalnya dilaksanakan setiap tahun. Awalnya penetapan upah tersebut berproses sangat lama dan panjang, Dewan Pengupah Daerah (DPD) yang terdiri dari akademisi, pengusaha dan buruh sepakat membentuk sebuah tim survey untuk melihat langsung kondisi lapangan, dimana apa saja kebutuhan yang dibutuhkan pegawai dan berapa harganya. Dari hasil survey tersebut diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kemudian tim DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Kebutuhan hidup layak dijadikan pedoman penentu upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang. Saat ini UMR juga sering disebut dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) karena ruang lingkungannya mencakup satu provinsi. Setelah itu dikenal juga dengan istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Untuk dapat memahami lebih lanjut pengertian gaji dan upah perlu diketahui terlebih dahulu beberapa definisi dari gaji dan upah menurut pendapat para ahli di bawah ini. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13/2003 pasal 1 ayat 30 (2003) upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Handoko (1996:14) upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha (pemberi kerja) dan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.

Menurut Niswonger (1996:446) Istilah upah (wages) biasanya digunakan untuk pembayaran kepada karyawan lapangan (pekerja kasar) baik yang terdidik maupun tidak terdidik. Tarif upah biasanya diekspresikan secara mingguan atau per jam. Sedangkan menurut Mulyadi (2001:373) upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan.

Menurut Ferdinand Lassalle (1999) dalam teori upah besi menerangkan bahwa penerapan system upah kodrat menimbulkan tekanan kaum buruh, karena kaum buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah diterapkan oleh para produsen. Untuk itulah Lassalle menganjurkan untuk membentuk serikat pekerja.

Menurut John Stuart Mill (2000) dalam teori upah menerangkan bahwa tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja, sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Kaum Utopis (2000) (kaum yang memiliki idealis masyarakat yang ideal) tindakan para pengusaha

yang memberikan upah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum merupakan suatu tindakan yang tidak “Etis”, oleh karena itu sebaiknya para pengusaha selain dapat memberikan upah yang layak kepada pekerja dan keluarganya, juga harus memberikan tunjangan keluarga.

Gaji, upah, dan honor merupakan bagian dari kompensasi-kompensasi yang paling besar yang diberikan perusahaan sebagai balas jasa kepada karyawannya. Dan bagi karyawan, hal ini merupakan nilai hak dari prestasi mereka dan juga sebagai motivator dalam bekerja. Sedangkan bagi perusahaan jasa, gaji, upah, dan honor merupakan komponen biaya yang mempunyai dampak besar dalam mempengaruhi laba, sehingga harus terus diawasi pengelolaannya.

Mulyadi (2008) menyebutkan bahwa gaji adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manager dan tidak berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Umumnya gaji dibayarkan tetap setiap bulan, sedangkan upah pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.

Rivai (2010) menyebutkan gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil

dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.

Selain gaji dan upah, terdapat istilah honor yang secara harafiah diartikan sebagai upah kerja. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, honor diterjemahkan secara singkat sebagai imbalan upah jasa. Sementara dalam bahasa Inggris honor diserumpunkan kedalam respect, honour, reverence, regard, revere, tribute. Honor sebenarnya lebih kepada penghargaan pengakuan, bukan kepada pemberian materi (uang). Namun, seiring berjalannya waktu, tentulah tidak bijak tanpa memberikan honor dalam bentuk materi. Selain itu, ada pula istilah honorarium yang artinya upah diluargaji atau upah sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, guru, bidan, dokter, pengacara, konsultan, tenaga honorerserta profesi lain yang diperuntukkan sebagai pengabdian kepada masyarakat (Artikelkuningan, 2012).

Istilah penggajian tidak dapat diterapkan untuk pembayaran atas jasa profesional seperti akuntan publik, pengacara, dokter dan arsitek. Profesional tersebut adalah pekerja lepas dan bukan karyawan yang digaji. Pembayaran yang mereka terima disebut honor (fees), bukan gaji atau upah.

b. Jenis jenis upah minimum

Upah terbagi dalam tiga jenis yaitu:

- 1) Upah Pokok

Upah yang diberikan kepada pegawai dengan dibedakan atas upah perjam, perhari, perminggu, perbulan.

2) Upah Lembur

Upah yang diberikan kepada pegawai yang bekerja melebihi jam kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan

3) Tunjangan

Tunjangan merupakan sejumlah uang yang diterima pegawai secara keseluruhan karena adanya keuntungan dari perusahaan pada akhir tahun neraca.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Oktavian aDwi Saputri (2010)	Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Salatiga	<i>Regresi Linier Berganda</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah an produktivitas tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kota salatiga.
2	Kadir, Manut Rahim dan La Ode Suradi (2005)	Pengaruh Investasi dan Konsumsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Kota Kendari	<i>Regresi Berganda</i>	Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan investasi dan konsumsi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Kota Kendari
3	Asruni (2013)	Pengaruh Faktor Upah Minimum Kabupaten, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah	<i>Regresi Berganda</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga

		Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Kecil di Kabupaten Tanah		kerja industri kecil. Dan investasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja
4	Tania (2014)	Keterkaitan Financial Attitude, Financial Behavior dan Financial Knowledge pada Mahasiswa Strata 1 Universitas Atmajaya	<i>regresi logistik dan uji one-way ANOVA</i>	1. Terdapat hubungan antara karakteristik responden terhadap financial attitude, financial behavior. 2. Terdapat hubungan antara financial attitude terhadap financial behavior. 3. Terdapat hubungan antara financial behavior terhadap topik yang diketahui responden didalam lingkungan keluarga dan sumber peningkatan pengetahuan keuangan.
5	Elsa Gustiany Mardianto (2015)	Analisis Faktorfaktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur di Kabupaten Bandung	<i>regresi berganda</i>	penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PMA, PDRB, memiliki hubungan positif & signifikan. PDRB memiliki hubungan positif & signifikan. INF memiliki hubungan negatif & signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja
6	I Gusti Agung Indradewa, Ketut Suardhika Natha, (2015)	Pengaruh Inflasi, Pdrbdan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali	<i>regresi linear berganda</i>	hasil yang diperoleh adalah secara simultan, ketiga variabel bebas yang diuji memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan secara parsial, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan upah minimum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sementara inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun

				1994-2013”.
7	Melia Elmi Lavianty (2016)	Pengaruh Pdrb, Investasi, Upah Dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2008-2013	<i>model regresi fixed effect</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) PDRBsecaraparsial berpengaruh positifdan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; 2) Investasisecara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; 3) Upahsecara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; 4) Inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
8	Rudi Hartono (2018)	Pengaruh produk domestik regional bruto (pdrb) dan upah minimum kota (umk) terhadap penyerapan tenaga kerja	<i>analisis cobb douglas</i>	Hasil penelitian secara simultan atau bersama-sama dalam Uji F, Kedua variable independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kota secara bersama-sama mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Samarinda. Kemudian dengan uji t, Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerjadi Kota Samarinda.
9	Arin Luthita Anamath ofani (2019)	Pengaruh Upah Minimum, Pdrb, Dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Malang	<i>analisis regresiliner berganda</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel yang signifikan mempengaruhi variabel penyerapan tenaga kerja di Kota Malang yaitu PDRB (X2).
10	Latri Wihastuti (2012)	Upah Minimum Provinsi (Ump) Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa	<i>model fixed effec</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan

				ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
11	Nofandilah Arumsyah Putri (2018)	Analisis Pengaruh Upah, Pdrb, Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kawasan Gerbangkertasula Tahun 2012-2016	<i>Model Random Effect (REM)</i>	Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Upah berpengaruh negatif sebesar -0.069927 dan signifikan, variabel PDRB berpengaruh negatif sebesar -0.253666 dan signifikan, sedangkan variabel investasi berpengaruh positif sebesar 0.599640 terhadap penyerapan tenaga kerja.
12	A.Rian Patriansyah (2018)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Umr, Pdrb Dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah Tahun 2011 -2016	<i>metode Random Effect</i>	Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Upah Minimum mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, PDRB mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan, Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.
13	Nur Insana (2019)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Takalar	<i>regresi berganda</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Upah minimum Regional (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Takalar; variabel rata-rata lama sekolah (X2) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Takalar; dan variabel pertumbuhan ekonomi (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan

				terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Takalar.
14	Reni Helvira (2020)	Pengaruh Investasi, Upah Minimum Dan Ipm Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Kalimantan Barat	analisis regresi data panel	Hasil: penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum. dan indeks indeks pembangunan manusia secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat. Kemudian secara parsial (secara individu) variabel investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat.
15	Anselmus Tomi Karisma Putra (2017)	Pengaruh Pdrb, Tingkat Inflasi, Dan upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 1997-2015	<i>analisis regresi berganda (OLS)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel PDRB, iflasi, dan juga Upah Minimum Provinsi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah.
16	Murniati. D. Kaluge dan Yolani Ardian (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Jumlah Investasi Di Provinsi Jambi	<i>path analisis</i>	Dari hasil penelitiandi peroleh kesimpulan sebagai berikut :1. a. Pertumbuhan ekonomi (X1) berpengaruh signifikan terhadap jumlah investasi dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 13,573 > 2,447.b. Tingkat upah (X2)

				<p>berpengaruh signifikan dengan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $32,026 > 2,447$.</p> <p>2. a. Pertumbuhan ekonomi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran (Y2) karena nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $-2,818 < 2,571$. b. Tingkat upah (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran (Y2) karena nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $2,159 < 2,571$. c. Jumlah investasi (Y1) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran (Y2) karena nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $2,284 < 2,571$. 6. 3.</p>
17	Rini Sulistiawati (2012)	Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia	<i>Model Analisis Jalur</i>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum akan menurunkan penyerapan tenaga kerja dengan produktivitas rendah yang umumnya menyerap tenaga kerja di sektor primer, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Kedua, penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan sosial memiliki koefisien β 0,08 dengan nilai probabilitas signifikansi (Sig) sebesar 0,332. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia karena: 1) Upah minimum yang diterima</p>

				tenaga kerja lebih rendah dari kebutuhan pokok minimum, 2) upah minimum yang diterima oleh tenaga kerja adalah lebih rendah dari tingkat penghasilan kena pajak.
18	Muh.Nurhadi (2019)	Dampak Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal Dan Informal: Analisis Spasial	<i>model Panel Spasial Auto-Regressive</i>	Hasil kedua model menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum secara signifikan mengurangi penyerapan tenaga kerja sektor formal dibandingkan dengan sektor informal. Nilai koefisien dampak peningkatan upah minimum yang dihasilkan oleh model spasial lebih besar dari pada model non spasial sedangkan dari kriteria model hasil menunjukkan model spasial yang lebih baik, sehingga dapat disimpulkan terdapat underestimate pada penelitian sebelumnya yang tidak memperhitungkan memperhitungkan ketergantungan spasial pasar tenaga kerja.
19	Irfan Ackhadi (2019)	Pengaruh Inflasi, Kenaikan Upah Minimum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pdrb Provinsi Banten 2010-2017	<i>model fixed effect</i>	Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) inflasiberpenruh negtaifdan signifikan terhadap PDRB di provinsi banten pada tahun 2010-2017; 2) kenaikan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB provinsi banten 2010-2017; 3) jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB provinsi banten tahun 2010-2017
20	Nurhidayah (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhitingkat Pengangguran	<i>model regresibe rganda</i>	Hasilpenelitianinimenunjukk anbahwatingkat investasi berpengaruhnegatif dansignifikanterhadaptingkat pengangguranterbuka.Sedang

		Terbuka Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2016		kan pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2007-2016.
21	Zadit Taqwa (2018)	Analisis Pengaruh Tingkat Upah Minimum Regional (Umr) Dan Inflasi Terhadap Tingkat Investasi Di Sumatera Utara Tahun 2002-2016	<i>metode Ordinary Least Square (OLS)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upah Minimum Regional (UMR) secara signifikan positif mempengaruhi Investasi Sumatera Utara dengan nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi (5%) atau $0,0000 < 0,05$. 2) Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Investasi Sumatera Utara dengan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (5%) atau $0,9128 > 0,05$. 3) Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Investasi Sumatera Utara dengan nilai probabilitas (F-statistic) lebih kecil dari tingkat signifikansi (5%) atau $0,000007 < 0,05$. Pada uji determinasi menunjukkan bahwa sekitar 0.861279 atau 86,1% variabel Upah Minimum Regional (UMR) dan Inflasi dapat menjelaskan Investasi Sumatera Utara pada periode 2002-2016, sedangkan sisanya 13,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.
22	Nina Cahyani (2016)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Upah	<i>regresi linier berganda</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pertumbuhan ekonomi tidak

		minimum regional, Inflasi, Dan investasi terhadap jumlah pengangguran tahun 1986-2015		berpengaruh terhadap jumlah pengangguran diDIY tahun1986-2015;2) upah minimum regional berpengaruh positif terhadap jumlah pengangguran di DIY tahun 1986-2015;3) inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah pengangguran di DIY tahun 1986-2015 ;dan 4) investasi berpengaruh negative terhadap jumlah pengangguran di DIY tahun 1986-2015
23	Yulia Pangastuti 2015	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah	<i>Metode Random Effect (REM).</i>	asil penelitian menunjukkan pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif sebesar 0.000504. Pengaruh UMK terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dengan besarnya koefisien 0.06523. Pengaruh pengangguranterhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dengan besarnya koefisien2.480002. Pengaruh PAD terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan positif dengan besarnya koefisien 0.000170. Nilai probabilitas masing masing variabel yang tidak signifikan yaitu PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP), serta Pendapatan Asli Daerah. Variabel yang signifikan yaitu Penganguran karena nilai probabilitas < dari alpha. Sehingga perlu dikajinya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah antara lain

				jumlah perusahaan, nilai produksi, suku bunga dan lain sebagainya.
25	Samuel Randy Tapparan (2017)	Pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan	<i>metode Structural Equation Model (SEM)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum dan investasi tidak memiliki pengaruh terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

Sumber : peneliti 2020

C. Kerangka Konseptual

1. Hubungan Inflasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Inflasi yang terjadi pada perekonomian memiliki beberapa dampak yang diantaranya adalah inflasi menyebabkan perubahan output dan tenaga kerja. Dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitas inflasi terjadi. Perusahaan akan menambah jumlah output apabila masih terjadi inflasi ringan. Keinginan perusahaan menambah output tentu juga dibarengi penambahan faktor produksi seperti tenaga kerja. Dengan kondisi itu maka permintaan akan tenaga kerja akan meningkat yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan akan mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional (Nanga, 2005).

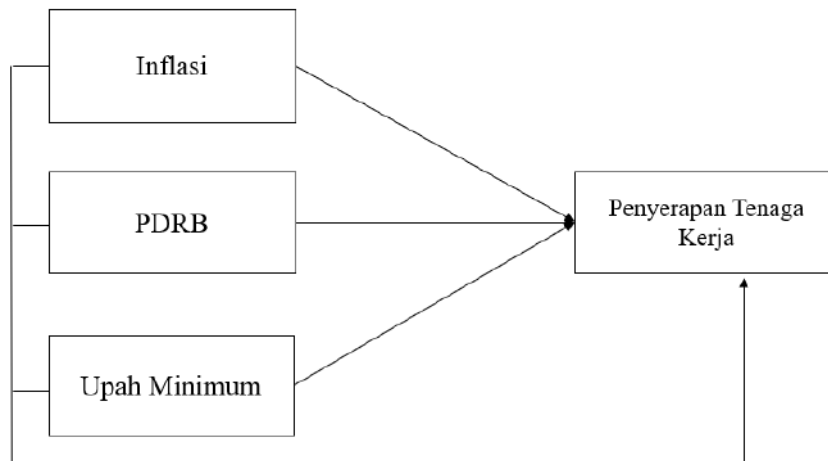
2. Hubungan Antara PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja

Produk regional domestik bruto (PDRB) dapat dilihat sebagai perekonomian total. Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan kerja baru dan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan penggunaan tenaga kerja guna untuk meningkatkan faktor produksi perusahaan

tersebut. Dengan demikian akan dapat mengurangi jumlah angka pengangguran jika terjadi peningkatan tenaga kerja (Mankiw, 2000). Jika produk domestik regional bruto meningkat maka permintaan jumlah tenaga kerja juga akan meningkat, dimana peningkatan produk domestik regional bruto berbanding dengan naiknya pertumbuhan ekonomi sehingga kemakmuran masyarakat juga bertambah. Ketika kemakmuran masyarakat bertambah akan menyebabkan banyaknya atau tersedianya lowongan pekerjaan yang berdampak akan mengurangi angka pengangguran (Lincoln, 1997).

3. Hubungan Tingkat Upah dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Naiknya upah maka akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi perusahaan, yang mana akan meningkatkan harga barang per unitnya. Biasanya akan cepat memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga pada suatu barang sehingga tingkat konsumsi akan menurun. Sehingga banyak produk yang tidak habis terjual karena berkurangnya konsumsi masyarakat dan perusahaan memaksa untuk mengurangi jumlah produksinya. Dengan adanya pengurangan jumlah produksi suatu barang maka akan membuat kebutuhan akan tenaga kerja berkurang, dari hal tersebut maka akan adanya penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akibat penurunan skala produksi. Apabila upah naik terdapat pengusaha yang lebih memilih untuk menggunakan teknologi untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang modal seperti mesin (Sumarsono, 2009).



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Peneliti (2020)

D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori di atas, penelitian yang relevan dan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Inflasi provinsi Sumatera Utara berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Deli Serdang.

H2: PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Deli Serdang.

H3: Upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Deli Serdang.

H4: Inflasi, PDRB dan Upah Minimum secara serempak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Deli Serdang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Didalam proposal skripsi ini, metode yang akan digunakan untuk melakukan penelitian yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, karena menguji hipotesis dengan menggunakan alat analisis statistik dan dijelaskan secara deskriptif. Data kuantitatif merupakan data statistik berbentuk angka-angka, baik secara langsung digali dari hasil pengolahan data kualitatif menjadi kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2012, hal 13), “metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya digunakan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan “.

Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka dan memerhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum sedangkan variabel dependen (Y) adalah Penyerapan tenaga kerja.

B. Definisi Operasional Variable

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala sesuai dengan rumusan masalah. Adapun definisi operasional dari

masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Berikut indikator dirangkum dalam tabel dan disertakan variabel, indikator, sub indikator dan skala pengukuran.

Tabel 3.1
Defenisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Inflasi	Inflasi dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus.	Tingkat Inflasi Tiap Kabupaten/Kota	Rasio
PDRB	Pendapatan jumlah penduduk yang diperoleh dari jumlah PDRB dibagi jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu.	Data PDRB	Rasio
Upah Minimum	Upah Minimum Regoinal adalah standart terendah yang digunakan para pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pegawai atau karyawan dalam lingkup perusahaannya.	Total Upah Minimum Kabupaten/Kota	Rasio
Penyerapan Tenaga Kerja	Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.	Total Penduduk Yang Bekerja	Rasio

Sumber: peneliti 2020

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini di Daerah Kabupaten Deli Serdang. Waktu penelitian direncanakan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan selesai.

Jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Kegiatan	Jan'20	Feb'20	Mar'20	Apr'20
1	Riset pengajuan judul	■			
2	Penyusunan Proposal		■		
3	Seminar Proposal			■	
4	Perbaikan/Acc Proposal			■	
5	Pengolahan Data			■	
6	Penyusunan skripsi				■
7	Bimbingan Skripsi				■

Sumber: peneliti 2020

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yang dilakukan dengan mengambil data-data serta mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan. Kemudian mempelajari dan menganalisis uraian-uraian yang bersifat literature ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Menurut Arikunto (2010, hal 201), “metode dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Sedangkan wawancara menurut Arikunto (2010, hal 198) adalah dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari telewicara (interview)”.

1. Analisis Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2012, hal 277), “analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua)”.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yang jumlahnya dua atau lebih dari dua terhadap variabel dependen (Y). Untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Persamaan analisis regresi linear berganda secara umum dalam menguji hipotesis-hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Variabel PAD

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi variabel X₁

b₂ = Koefisien regresi variabel X₂

b₃ = Koefisien regresi variabel X₃

X₁ = Variabel Inflasi

X₂ = Variabel PDRB

X₃ = Variabel Upah minimum

e = Error / variabel yang tidak diteliti

Syarat yang mendasari metode regresi berganda adalah terpenuhinya semua asumsi klasik, agar hasil pengujian tidak bias. Adapun uji asumsi klasik sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016:110). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam regresi adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai *Centered* VIF variable bebas (independen) > 10 , maka data tersebut terjadi multikolinearitas.
- 2) Jika nilai *Centered* VIF variable bebas (independen) < 10 , maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas

c. Uji Heterokrdastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (Uji t) dan penyajian secara simultan (Uji F).

a. Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F table dengan ketentuan sebagai berikut :

Apabila : $p > 0,05 = H_a$ ditolak H_0 diterima

$p < 0,05 = H_a$ diterima atau H_0 ditolak

atau :

kriteria pengambilan keputusan (KPK)

Terima H_0 (Tolak H_a) apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $Sig F > 0,05$

Terima H_a (Tolak H_0) apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $Sig F < 0,05$

Rumus Uji F adalah sebagai berikut:

Keterangan :

R^2 = koefisien korelasi berganda dikuadratkan

n = jumlah sampel

K = jumlah variabel bebas

b. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} terhadap t_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2009):

Apabila: $p > 0,05 = H_a$ ditolak atau H_0 diterima

$p < 0,05 = H_a$ diterima atau H_0 ditolak

atau:

Kriteria pengambilan keputusan (KPK)

Terima H_0 (Tolak H_a) apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $Sig > 0,05$

Terima H_a (Tolak H_0) apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $Sig < 0,05$

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Determinasi dapat dinyatakan dengan rumusan sebagai berikut:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Dimana:

D : Koefisien Determinasi

R : Koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

100% : Persentase Kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Utara terletak diantara 2° 57 Lintang Utara dan 3° 16 Lintang Selatan dan 98° 33 - 99° 27 Bujur Timur dengan luas wilayah 2.497.72 km². Wilayah Kabupaten Deli Serdang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun,sebelah Timur dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat.

Kabupaten Deli Serdang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka,sebagai salah satu daerah lintas pelayaran paling sibuk didunia. Kabupaten ini mengelilingi 2 (dua) kota Utama di Sumatera Utara. Dengan posisi strategis, sumber daya alam dan tenaga kerja yang dimiliki oleh Kabupaten Deli Serdang akan menjadi potensi yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan yang kompetitif dalam menghadapi persaingan dalam menarik investor untuk mengembangkan usahanya di daerah ini dan sasaran lainnya dalam memasarkan produk/jasa yang dihasilkan.

Dalam kurun waktu 2009-2019, penduduk yang bekerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan

mengalami fluktuasi, sempat meningkat di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, dan menurun lagi di tahun 2017. Begitu juga dalam kurun waktu yang sama, penduduk yang bekerja di lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi serta jasa kemasyarakatan juga mengalami fluktuasi jumlah pekerja.

2. Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Deskripsi data digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian. Deskripsi data ini meliputi nilai minimum, nilai maximum, mean dan standar deviasi. Nilai minimum merupakan nilai terendah untuk setiap variabel, sedangkan nilai maksimum adalah nilai tertinggi dari setiap variabel. Nilai mean merupakan nilai rata-rata dari setiap variabel yang diteliti. Standar deviasi merupakan sebaran data yang digunakan dalam penelitian yang mencerminkan data tersebut heterogen atau homogen yang sifatnya fluktuatif.

Adapun Hasil dari analisis regresi linier berganda dari penyerapan Tenaga kerja, Inflasi dan PDRB disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 05/25/21 Time: 22:13
Sample: 2009M01 2019M12
Included observations: 132
Convergence achieved after 22 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.685943	0.380627	14.93837	0.0000
X1	0.391659	0.051659	7.581664	0.0000
X2	-0.408978	0.127800	-3.200136	0.0017
X3	-1.86E-07	2.02E-06	-0.092394	0.9265
AR(1)	0.978615	0.023048	42.45934	0.0000
SIGMASQ	0.002677	0.000154	17.33012	0.0000
R-squared	0.958642	Mean dependent var		5.572879
Adjusted R-squared	0.957000	S.D. dependent var		0.255406
S.E. of regression	0.052962	Akaike info criterion		-2.970138
Sum squared resid	0.353426	Schwarz criterion		-2.839102
Log likelihood	202.0291	Hannan-Quinn criter.		-2.916891
F-statistic	584.1081	Durbin-Watson stat		1.326785
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.98			

Dari tabel 4.1 di atas didapatkan F hitung sebesar 0.974544 dengan taraf signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas < taraf signifikansi yang ditolerir ($0,000 < 0.05$), maka H_a diterima dan menolak H_o . Ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan inflasi, PDRB dan upah minimum secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linear berganda maka didapat persamaan pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sebagai berikut:

$$Y = 6.20 + 0.06X1 - 1.28X2 - 2.62X3$$

Dimana :

Y = Variabel Penyerapan Tenaga Kerja (PTK)

- X1 = Variabel Inflasi
X2 = Variabel PDRB
X3 = Variabel Upah minimum

Interprestasi data:

Jika Inflasi naik satu satuan maka Penyerapan Tenaga Kerja naik sebesar 0.06 satuan

Jika PDRB naik satu satuan maka Penyerapan Tenaga Kerja turun sebesar 1.28 satuan

Jika Upah Minimum naik satu satuan maka Penyerapan Tenaga Kerja turun sebesar 2.62 satuan

Jika Inflasi, PDRB dan Upah Minumum tidak berubah maka Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 6.21 satuan

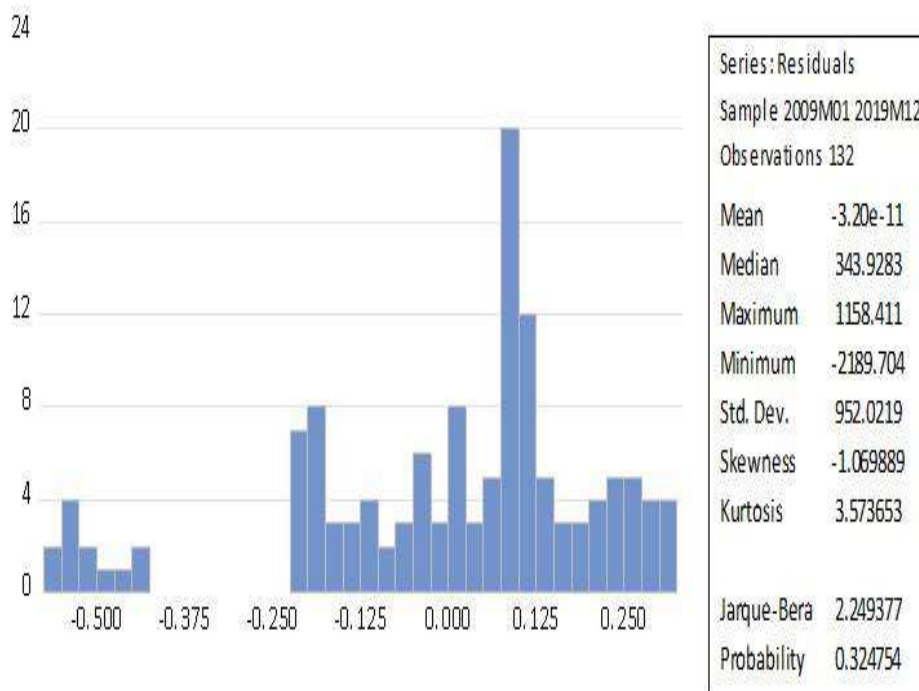
3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas residual dapat dilihat dengan uji statistik non parametik Kolmogorov Smirnov (K-S) (Ghozali, 2016).

Jika pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Berikut adalah hasil uji normalitas:

Tabel 4.2. Uji Normalitas



Dari hasil uji ini, dapat dilihat bahwa nilai probability Jarque berra sebesar $0,324574 > 0,05$ artinya residual data penelitian terdistribusi secara normal, maka data dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi berganda.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolineritas merupakan korelasi variabel independen dalam regresi berganda. Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya multikolineritas dapat dilihat dari besarnya nilai *Centered VIF (Variance Inflation Factor)*. Jika *Centered VIF* melebihi angka 10,00, maka variabel tersebut mengindikasikan adanya multikolineritas

Adapun hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Table 4.3. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 05/23/21 Time: 22:17
Sample: 2009M01 2019M12
Included observations: 132

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
INFLASI__X1_	0.011813	7.234812	1.998523
PDRB__X2_	0.050558	33.59851	1.769191
UPAH_MINIMUM__X3_	1.42E-13	10.54778	1.181220
C	0.010580	29.27856	NA

Sumber: peneliti 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil multikolinearitas menggunakan metode Variance Inflation Factors, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas atau disebut dengan non multikolinearitas, karena nilai VIF dari masing-masing variabel $X_1=1.998523$, $X_2=1.769191$ dan $X_3=1.181220$ lebih kecil dari 10,00. Dengan hasil ini maka uji asumsi klasik multikolinearitas telah terpenuhi.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi dapat diketahui melalui Uji Breusch-Godfrey, dimana pengujian yang digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya korelasi serial dalam model regresi atau untuk mengetahui apakah di dalam model yang digunakan terdapat autokorelasi diantara variabel-variabel yang diamati. Berikut ini hasil uji autokorelasi pada penelitian ini.

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	825.8899	Prob. F(2,126)	0.0000
Obs*R-squared	122.6445	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Sumber: peneliti 2020

Dari hasil uji autokorelasi di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas adalah sebesar 0.000, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian.

4. Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda pada Tabel 4.1 maka dapat diketahui, nilai probabilitas $F_{hitung}=(1.704) < (\alpha=0,05)$, sehingga H_0 ditolak artinya seluruh variabel bebas yakni variabel X1 (inflasi), X2 (PDRB), dan X3 (upah minimum) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Deli serdang).

b. Uji T

Uji T (t test) digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda pada Tabel 4.1 maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel bebas yakni variabel inflasi, PDRB, dan upah minimum terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.

i. Inflasi (X1)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki nilai probabilitas signifikansi $T_{hitung}(0,506110) < (T_t = 3.16 / -3.16)$, sehingga H_0 diterima. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah inflasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang.

ii. PDRB (X2)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki nilai $T_{hitung}(-5.709.769) > (T_t = 3.16 / -3.16)$, sehingga H_0 ditolak dengan signifikan level 1%. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang.

iii. Upah minimum (X3)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki nilai $T_{hitung}(-0.695542) < (T_t = 3.16 / -3.16)$, sehingga H_0 diterima. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur total variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh seluruh variabel bebas. Dari hasil analisis di atas, nilai koefisien determinasi (nilai RR^2) sebesar 0.285508. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama mampu memberi penjelasan mengenai variabel dependen sebesar 28,55 %. Adapun 71,45% lagi dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pada variabel inflasi, dari hasil penelitian secara parsial selama tahun 2010-2019 di dapat bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi yang relatif tinggi merupakan hal yang sangat merugikan perekonomian sebab berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat dan dapat juga berdampak melambatnya perkembangan produksi.

Hasil yang menyatakan bahwa variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Deli Serdang ini adalah karena inflasi yang terjadi di kabupaten Deli Serdang bukan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan melainkan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang disebabkan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif listrik. Pada tahun 2010 inflasi cenderung meningkat dari tahun sebelumnya akibat kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif listrik sebesar 10% dan adanya kenaikan harga BBM yang memperbesar tingkat inflasi

tahun 2005 sebesar 15,74%, tahun 2008 sebesar 10,49%, juga tahun 2014 dimana inflasi mencapai 8,14%. Adanya kenaikan tarif listrik dan BBM ini akan meningkatkan biaya produksi sehingga harga produk-produk menjadi naik. Tingginya biaya produksi yang dikeluarkan membuat produsen akan mengurangi jumlah tenaga kerja dan itu berarti jumlah penyerapan tenaga kerja akan semakin berkurang.

Penelitian yang mendukung temuan ini adalah penelitian dari Indradewa dan Natha (2015) yang menyatakan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali, dan penelitian dari Hutagalung dan Santosa (2013) yang menyatakan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.

2. Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pada variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB), dari hasil penelitian secara parsial selama tahun 2010-2019 di dapat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja. Koefisien yang bertanda positif bermakna bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah searah, artinya apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi, maka berpotensi untuk menaikkan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis sebelumnya, di mana pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Deli serdang.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan gambaran aktivitas perekonomian dalam suatu daerah. Pengukuran PDRB sangat diperlukan dalam

kebijakan makroekonomi. Pengukuran tersebut dapat digunakan untuk menghadapi berbagai masalah sentral yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, siklus usaha, hubungan antara kegiatan ekonomi dan pengangguran, serta ukuran faktor penentu inflasi. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut.

PDRB merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi (penambahan output yang dihasilkan), apabila PDRB meningkat maka jumlah kesempatan kerja akan semakin besar. PDRB dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat maka jumlah nilai output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu daerah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan. Hal tersebut secara langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Febryana Rizqi (2016) yang menyatakan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, dan hasil penelitian Indradewa dan Natha (2015) yang menyatakan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.

3. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pada variabel upah minimum, dari hasil penelitian secara parsial selama tahun 2010-2019 di dapat bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan analisis diatas terdapat kesesuaian dengan teori yang ada yaitu menurut N. Gregory Mankiw, yang menyebutkan

bahwa bagi sebagian besar pekerja, upah minimum ini tidak berpengaruh, karena mereka menikmati upah di atas upah minimum. Sementara menurut Suparmoko, biasanya di kota dibutuhkan tenaga-tenaga yang punya kepandaian atau pendidikan tertentu. Artinya disini bahwa upah minimum kota dapat tidak berpengaruh bagi sebagian besar pekerja karena mereka telah menikmati upah diatas upah minimum yang telah ditetapkan dan umumnya mereka adalah tenaga kerja yang berpendidikan. Kemudian hal lain yang mendukung pernyataan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga di Kabupaten Deli Serdang dapat disebabkan karena penduduk yang bekerja di Kabupaten Deli Serdang jumlahnya lebih besar yang bekerja pada pasar kerja primer/pasar kerja di sektor formal dari pada yang bekerja pada pasar kerja sekunder/informal. Dimana pada pasar kerja sektor formal ada aturan atau prosedur yang jelas pada mekanisme pasar kerja dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Sebaliknya, pasar kerja sektor informal hanya menawarkan tingkat upah yang relatif rendah, tidak mempunyai jenjang jabatan (dead end job).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa data yang telah dilakukan, maka dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang tahun 2009-2019. Hal ini karena inflasi yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang bukan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan melainkan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang disebabkan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif listrik.
2. PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten Deli Serdang tahun 2009-2019. PDRB merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi (penambahan output yang dihasilkan), apabila PDRB meningkat maka jumlah kesempatan kerja akan semakin besar. PDRB dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat maka jumlah nilai output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu daerah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan. Hal tersebut secara langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

3. Upah minimum memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang tahun 2009-2019. Upah minimum Kabupaten Deli Serdang berpengaruh bagi sebagian besar pekerja karena mereka telah menikmati upah diatas upah minimum yang telah ditetapkan dan umumnya mereka adalah tenaga kerja yang berpendidikan. Selain itu penduduk yang bekerja di Kabupaten Deli Serdang jumlahnya lebih besar yang bekerja pada pasar kerja primer/pasar kerja di sektor formal daripada yang bekerja pada pasar kerja sekunder/informal.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Hendaknya pemerintah daerah menyusun kebijakan pengupahan sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi serta meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga kebijakan pengupahan akan berorientasi kepada kepentingan seluruh pihak.
2. Pemerintah daerah hendaknya mendorong dan memacu peningkatan produk domestik regional bruto disetiap sektor ekonomi sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat.
3. Pemerintah daerah hendaknya mendorong investasi pada sector-sektor yang padat karya dan lebih selektif dalam memberikan ijin bagi pemilik

modal terkait dengan proyek-proyek yang akan direalisasikan sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Roni. 2010. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Alma, Buchari. 2012. Pengantar Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Budi Utami, Turminijanti. 2009. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto, Angkatan Kerja dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Jember. Tesis. Pasca Sarjana Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jember
- Dimas, Nenik Woyanti. 2009. Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 16. No. 1. Hal. 31-41 Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Efendi, B. (2018). Analisis Pengaruh Hasil Tangkapan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. JEpa, 3(1), 57-64.
- Ferdinan, Hery. 2011. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, PDRB, dan Upah Riil Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Barat. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
- Feriyanto, Nur. 2014. Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Fridhowati, Nila. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Pulau Jawa. Skripsi. Institut Pertanian Bogor
- Gindling T.H and Terrel Katherine. 2006. The Effect of Multiple Minimum Wage Throughout the Labour Market: The Case os Costa Rica. Journal of Labour Economics. 14 (2007) Hal. 485-511
- Gujarati, Damodar & Dawn C. Porter. 2012. Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2: Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat
- Gujarati, Damodar. 2006. Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 1: Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Inradewa, I Gusti Agung. 2013. Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
- Kuncoro, Haryo. 2002. Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang Vol.

- Kuncoro, Mudrajat. 2013. Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Kusnendi. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam. Jakarta: Universitas Terbuka
- Mankiw, N. Gregory. 2003. Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga
- Nadianaputri, Marsha. 2015. Analisis Determinan Pengangguran: Studi Kasus di 33 Provinsi Indonesia 2009-2013. Skripsi. Universitas Gajah Ma
- Payaman J. Simajuntak, 2001. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: LPFE UI
- Purba, E., & Nasution, D. P. (2018, February). Planting pattern and weed control method influence on yield production of corn (*Zea mays L.*). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 122, No. 1, p. 012067). IOP Publishing.
- Rahmawati, Ikka Dewi. 2013. Pengaruh Investasi dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur. Skripsi. Universitas Negeri Surabaya
- Rahmawati, D., & Naibaho, A. R. (2018). Tingkat *Gemeinschaft City* Masyarakat pada Permukiman Nelayan Kedung Cowek. *Jurnal Penataan Ruang*, 13(2), 54-59.
- Rangkuty, D. M., & Sari, M. M. (2019). Analisis Utang Luar Negeri dan Inflasi Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 19(1), 57-66.
- Sholeh, Maimun. 2007. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* Volume 4 Nomor 1 hal 62-74
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 1997. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja
- Sumarsono, Sonny. 2009. Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Todaro, M.P dan Stephen C.S. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga: Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Yamin, Sofyan, Lien A. Rachmach dan Heri Kurniawan. 2011. Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda: Aplikasi dengan Software SPSS, EViews, MINITAB dan STATGRAPHICS. Jakarta: Salemba Empat.87